

**Artikel Ilmiah**

Volume 01 Nomor 02 Desember 2023

ISSN: xx-xxxx

Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Analisis Kesesuaian Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahannya di Kabupaten Karawang

Suitability Analysis of Industrial Designated Area Locations Based on Land Capability Class in Karawang Regency

Muhammad Ihsan Akbar¹

Institut Teknologi Sains Bandung, Perumnas Bumi Telukjambe Blok R

Corresponding Author:

e-mail: ¹ ihsanakbar756@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan Kawasan industri di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun berjalan. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah unit industri yang telah beroperasi, dimana selama tahun 2015 hingga 2021 telah terjadi peningkatan sebesar 5% atau dari semula 10.113 menjadi 10.569 unit industri berdasarkan publikasi dari Open Data Jabar. Kondisi ini tentu akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah, terlebih lagi sektor industri merupakan diantara sektor yang diandalkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Karawang. Namun disisi lain, kondisi ini justru dapat menjadi ancaman bagi kondisi lingkungan Kabupaten Karawang karena ketidakakuratan dalam berlokasi akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lokasi Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karawang telah sesuai dengan kelas kemampuan lahannya, melalui pendekatan metode analisis deksriptif dan spatial berupa analisis satuan kemampuan lahan yang berpatokan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2007. Hasil yang diperoleh berupa sembilan peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan peta kemampuan lahan. Setelah itu, dilakukan *overlay* terhadap peta kawasan peruntukan industri, sehingga diketahui kesesuaian lokasinya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui 99% lokasi Kawasan peruntukan industri berada di kelas pengembangan d dan e (Kawasan Pengembangan) dan 1% sisanya berada di kelas pengembangan C (Kawasan Penyangga) yang artinya secara mayoritas telah sesuai.

Kata kunci: *Industri, Lokasi, Analisis Kesesuaian, Karawang*

ABSTRACT

The growth of industrial areas in Karawang Regency continues to experience a significant increase during the current year. This can be indicated by the increase in the number of industrial units operating, where from 2015 to 2021 there has been an increase of 5% or from the original 10,113 to 10,569 industrial units based on publications from West Java Open Data. This condition will certainly have a positive impact on the regional economy, especially as the industrial sector is one of the sectors whose contribution to Karawang Regency's GRDP is relied upon. However, this condition could be a threat to the environmental conditions of Karawang Regency because inaccuracies in location will have a direct or indirect impact on the environment. This research aims to determine the extent to which the location of industrial designated areas in Karawang Regency is in accordance

with its land capability class, through a descriptive and spatial analysis method approach in the form of land capability unit analysis based on PUPR Ministerial Regulation Number 20 20 of 2007. The results obtained are in the form of nine The SKL map is then combined to produce a land capability map which is then overlaid on the map of industrial use areas so that the suitability of the location is known. Based on the results of the analysis, it is known that 92% of industrial designated areas are in development classes D and E (Development Areas) and the remaining 8% are in development class C (Buffer Areas), which means that the majority are appropriate.

Keywords: *Industry, Location, Conformity Analysis , Karawang*

1. Pendahuluan

Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI Jabar 1) di di Prov. Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada kedudukannya dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 yang menyebutkan bahwa keberadaan Kabupaten Karawang dipandang penting dalam WP Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang) yang salah satunya berfokus pada potensi pengembangan industri pengolahan serta menjadi bagian dalam WPPI Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang sebagai penggerak utama ekonomi dalam WPI sekaligus menjadi poros penyangga ibukota dengan konsentrasi industri besar yang tinggi. Kondisi ini tentu memiliki dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi daerah karena dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi baru diwilayah tersebut. Sejalan dengan itu, keberadaan jumlah unit industri di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan selama tahun 2015 hingga 2021, yaitu sebesar 5% dari semula 10.113 menjadi 10.569 unit industri berdasarkan publikasi dari Open Data Jabar.

Namun dilain sisi, kondisi ini juga dapat menjadi suatu ancaman lingkungan bagi Kabupaten Karawang karena melibatkan dampak *spatial* dari lokasi kegiatan industri tersebut. Dengan demikian, perkembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang juga tetap harus memperhatikan antara kesesuaian lokasi dengan kelas kemampuan lahannya. Hal ini ditujukan untuk mencegah pada terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, terlebih perkembangan yang pesat ini juga dapat memicu pada meningkatnya kebutuhan atas lahan untuk kegiatan industri, sehingga diperlukan pengawasan lebih lanjut terkait kesesuaian lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karawang. Kepentingan ini didasari pada peran kemampuan lahan yang berandil besar terhadap berlangsungnya kehidupan disuatu hamparan lahan, sebagaimana maksud dari Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009 Tentang Penentuan Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Rivaldo Restu Wirawan et al., 2019) mengenai daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Palu menggunakan metode analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL), analisis kemampuan lahan, dan analisis daya dukung lahan dengan hasil yang didapat adalah diketahuinya kemampuan pengembangan rendah sebagai mayoritas kemampuan pengembangan di Kota Palu serta hasil dari daya dukung lahan yang menyebutkan bahwa terdapat kelas daya dukung lahan e sebesar 74% yang telah melebihi standar rasio tutupan lahan sebesar 70%. Adapun, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang diacu ialah pada pembahasan terkait kesesuaian lokasi kawasan peruntukan industri terhadap kemampuan lahannya di Kabupaten Karawang sehingga bisa menjadi suatu evaluasi sekaligus menjadi contoh nyata dari manfaat adanya analisis kemampuan lahan

terhadap kesesuaian lokasi kawasan budidaya ataupun lindung disuatu wilayah. Maka dari itu, disusunnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian lokasi kawasan peruntukan industri dengan kemampuan lahannya di Kabupaten Karawang.

2. Metodologi

Penelitian ini dilangsungkan di Kabupaten Karawang meliputi seluruh kecamatan yang ada, dengan metode yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif deskriptif untuk menjabarkan terkait representasi kondisi eksisting berdasarkan hasil eksak dan visualisasi narasi yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Adapun, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sepenuhnya data sekunder baik yang didapatkan dari Bappeda Kabupaten Karawang, Portal MBG, maupun pada situs penyedia data *spatial* lainnya untuk kemudian diolah dalam media ArcGis 10.8 dan Microsoft Excel melalui perhitungan pembobotan dan skoring hingga dihasilkan darinya visualisasi keruangan/*spatial* yang sesuai. Variabel penelitian yang akan diukur/digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian		
Analisis	Variabel	Indikator
- Analisis Kemampuan Lahan di Kabupaten Karawang	Satuan Kemampuan Lahan	(1) SKL morfologi, (2) SKL kemudahan dikerjakan, (3) SKL kestabilan pondasi, (4) SKL kestabilan lereng, (5) SKL ketersediaan air, (6) SKL untuk drainase, (7) SKL terhadap erosi, (8) SKL terhadap pembuangan limbah, (9) SKL terhadap bencana alam

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pada bagian ini akan dijabarkan secara ringkas terkait langkah-langkah dalam menganalisis satuan kemampuan lahan beserta data-data dasar yang diperlukan hingga kesimpulan akhir diperoleh.

3.1.1. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL)

Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kriteria nilai yang ada disetiap data dasar pada masing-masing jenis SKL dengan kemudian disesuaikan berdasarkan rentang interval yang berlaku padanya.

1) SKL Morfologi

Dilakukan untuk mengetahui bentuk bentangan alam/morfologi suatu wilayah perencanaan untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam pengembangan fungsi wilayahnya.

Tabel 2. Pembobotan SKL Morfologi

Pembobotan SKL Morfologi						
Peta Kemiringan Lereng	Nilai	Peta Morfologi	Nilai	SKL Morfologi (Nilai)	Nilai	Tujuan
0-2	5	Dataran	5	Tinggi (9-10)	5	memiliah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah perencanaan yang mampu dikembangkan sesuai dengan fungsinya
2-5	4	Landai	4	Cukup (7-8)	4	
5-15	3	Perbukitan Sedang	3	Sedang (5-6)	3	
15-40	2	Pegunungan/Perbukitan Terjal	2	Kurang (3-4)	2	
>40	1	Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal	1	Rendah (1-2)	1	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 3. Hasil SKL Morfologi

Hasil SKL Morfologi		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
SKL Morfologi Cukup	184709.6044	96.3%
SKL Morfologi Kurang	2015.59449	1.1%
SKL Morfologi Rendah	49.66081344	0.0%
SKL Morfologi Sedang	5023.146456	2.6%
Total	191798.0062	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) SKL Kemudahan Dikerjakan

Dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan pada suatu wilayah untuk dilakukan penggalian/pematangan dalam proses pembangunan.

Tabel 4. Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan							
Peta Ketinggian	Nilai	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	SKL Kemudahan Dikerjakan	Tujuan
<500	5	0-2 %	5	Alluvial	5	11-15 Tinggi	mengetahui tingkat kemudahan lahan suatu wilayah untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan
		2-5 %	4	Latosol	4	10-7 Sedang	
500-1500	4	5-15 %	3	Brown Forest, Mediteran	3	6-3 Kurang	
1500-2500	3	15-40%	2				
		>40 %	1	Podsol Merah Kuning	2	0-3 Rendah	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 5. Hasil SKL Kemudahan Dikerjakan

Hasil SKL Kemudahan Dikerjakan		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Kemudahan Dikerjakan Sedang	10230.01472	5.4%
Kemudahan Dikerjakan Tinggi	180288.2606	94.6%
Total	190518.2753	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) SKL Kestabilan Lereng

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan.

Tabel 6. Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

Pembobotan SKL Kestabilan Lereng								
Ketinggian	Nilai	Kemiringan	Nilai	Morfologi	Nilai	SKL Kestabilan Lereng	Nilai	Tujuan
<500	5	0-2 %	5	Dataran	5	Tinggi (14-15)	5	mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan
		2-5 %	4	Landai	4	Cukup (12-13)	4	
500-1500	4	5-15 %	3	Perbukitan Sedang	3	Sedang (9-11)	3	
1500-2500	3	15-40%	2	Pegunungan/Perbukitan Terjal	2	Kurang (6-8)	2	
		>40 %	1	Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal	1	Rendah (4-5)	1	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 7. Hasil SKL Kestabilan Lereng

Hasil SKL Kestabilan Lereng		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Kestabilan Cukup	184709.6044	96.3%
Kestabilan Kurang	130.698548	0.1%
Kestabilan Sedang	6957.703211	3.6%
Total	191798.0062	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) SKL Kestabilan Pondasi

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima berat pembangunan perkotaan

Tabel 8. Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi										
Ketinggian	Nilai	Kemiringan	Nilai	Morfologi	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	SKL Kestabilan Lereng	Nilai	Tujuan
<500	5	0-2 %	5	Dataran	5	Alluvial	5	Tinggi (14-15)	5	mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan
		2-5 %	4	Landai	4	Latosol	4	Cukup (12-13)	4	
500-1500	4	5-15 %	3	Perbukitan Sedang	3	Brown Forest, Mediteran	3	Sedang (9-11)	3	
1500-2500	3	15-40%	2	Pegunungan/Perbukitan Terjal	2			Kurang (6-8)	2	
		>40 %	1	Pegunungan/Perbukitan Sangat Terjal	1	Podsol Merah Kuning	2	Rendah (4-5)	1	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 9. Hasil SKL Kestabilan Pondasi

Hasil SKL Kestabilan Pondasi		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Kestabilan Pondasi Cukup	185519.5081	96.3%
Kestabilan Pondasi Kurang	47.21176557	0.1%
Kestabilan Pondasi Sedang	4951.55544	3.6%
Total	190518.2753	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5) SKL Ketersediaan Air

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sebaran wilayah dengan kemampuan ketersediaan air yang ada.

Tabel 10. Pembobotan SKL Ketersediaan Air

Pembobotan SKL Ketersediaan Air								
Peta DAS	Nilai	Peta Curah Hujan	Nilai	Peta Guna Lahan	Nilai	SKL Ketersediaan Air	Nilai	Tujuan
Baik Merata	5	4000-4500 mm	5	Terbangun	2	Tinggi (11-12)	Tinggi (11-12)	mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing
		3500-4000 mm	4			Cukup (9-10)	Cukup (9-10)	
Baik Tidak Merata	4	3000-3500 mm	3	Non-terbangun	1	Sedang (7-8)	Sedang (7-8)	
Setempat Terbatas	3	2500-3000 mm	2			Kurang (5-6)	Kurang (5-6)	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 11. Hasil SKL Ketersediaan Air

Hasil SKL Ketersediaan Air		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Ketersediaan Air Cukup	49048.74896	26.2%
Ketersediaan Air Sedang	138228.3514	73.8%
Ketersediaan Air Tinggi	115.8670697	0.1%
	187392.9674	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6) SKL Drainase

Analisis ini untuk mengetahui kemampuan lahan dalam mengalirkan limpasan air hujan secara alami, sehingga dapat mencegah pada terjadinya genangan.

Tabel 12. Pembobotan SKL Drainase

Pembobotan SKL Drainase								
Peta Ketinggian	Nilai	Peta Kemiringan (%)	Nilai	Peta Curah Hujan	Nilai	SKL Drainase	Nilai	Tujuan
<500	5	0-2 %	5	2500-3000 mm	2	Tinggi (12-14)	3	mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami sehingga kemungkinan genangan dapat dihindari
		2-5 %	4	3000-3500 mm	3	Cukup (6-11)	2	
500-1500	4	5-15 %	3	3500-4000 mm	4			
1500-2500	3	15-40% >40 %	2 1	4000-4500 mm	5			

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 13. Hasil SKL Drainase

Hasil SKL Drainase		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Drainase Cukup	186718.3568	98.0%
Drainase Tinggi	3822.639617	2.0%
Total	190540.9965	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

7) SKL Terhadap Erosi

Analisis ini untuk mengetahui daerah yang rentan mengalami keterkikisan tanah.

Tabel 14. Pembobotan SKL Terhadap Erosi

Pembobotan SKL Terhadap Erosi										
Curah Hujan	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	Morfologi	Nilai	Kemiringan	Nilai	SKL Erosi	Nilai	Tujuan
2500-3000 mm	1	Podsol Merah kuning	2	Perbukitan Sangat Terjal	1	0-2%	5	Tinggi (7-10)	5	mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, mengetahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi dan antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir
3000-3500 mm	2	Mediteran, Brown Forest	3	Perbukitan Terjal	2	2-5%	4	Cukup (11-15)	4	
		Latosol	4			5-15%	3	Kurang (16-20)	3	
3500-4000	3	Alluvial	5	Perbukitan Sedang	3	15-40%	2	Rendah (21-24)	2	
						>40%	1			

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 15. Hasil SKL Terhadap Erosi

Hasil SKL Terhadap Erosi		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Erosi Cukup	189306.0872	99.4%
Erosi Kurang	319.2618973	0.2%
Erosi Tinggi	757.6233059	0.4%
Total	190382.9724	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8) SKL Pembuangan Limbah

Dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu dijadikan sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah.

Tabel 16. Pembobotan SKL Pembuangan Limbah

Pembobotan SKL Pembuangan Limbah										
Ketinggian	Nilai	Kemiringan (%)	Nilai	Curah Hujan	Nilai	Guna Lahan	Nilai	SKL Pembuangan Limbah	Nilai	Tujuan
<500	5	0-2 %	5	2500-3000 mm	2	Non-terbangun	1	Tinggi (4-6)	5	mengetahui daerah-daerah yang mampu dijadikan sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat atau cair
		2-5 %	4	3000-3500 mm	3			Cukup (7-8)	4	
500-1500	4	5-15 %	3	3500-4000 mm	4	Terbangun	2	Sedang (9-10)	3	
1500-2500	3	15-40%	2	4000-4500 mm	5			Kurang (11-12)	2	
		>40 %	1					Rendah (13-14)	1	

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

Tabel 17. Hasil SKL Pembuangan Limbah

Hasil SKL Pembuangan Limbah		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Pembuangan Limbah Kurang	139190.6439	75.6%
Pembuangan Limbah Rendah	44577.61563	24.2%
Pembuangan Limbah Sedang	354.8506901	0.2%
	184123.1102	100.0%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

9) SKL Bencana Alam

Dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam, khususnya terkait bencana alam geologi.

Tabel 18. Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam

Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam						
Rawan Banjir	Nilai	Rawan Longsor	Nilai	SKL Bencana Alam	Nilai	Tujuan
Tinggi	5	Tinggi	5	Tinggi (10-9)	5	mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya terkait bencana geologi
Sedang	4	Sedang	4	Sedang (8-7)	4	
Rendah	3	Rendah	3	Rendah (5-6)	3	
Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	2			

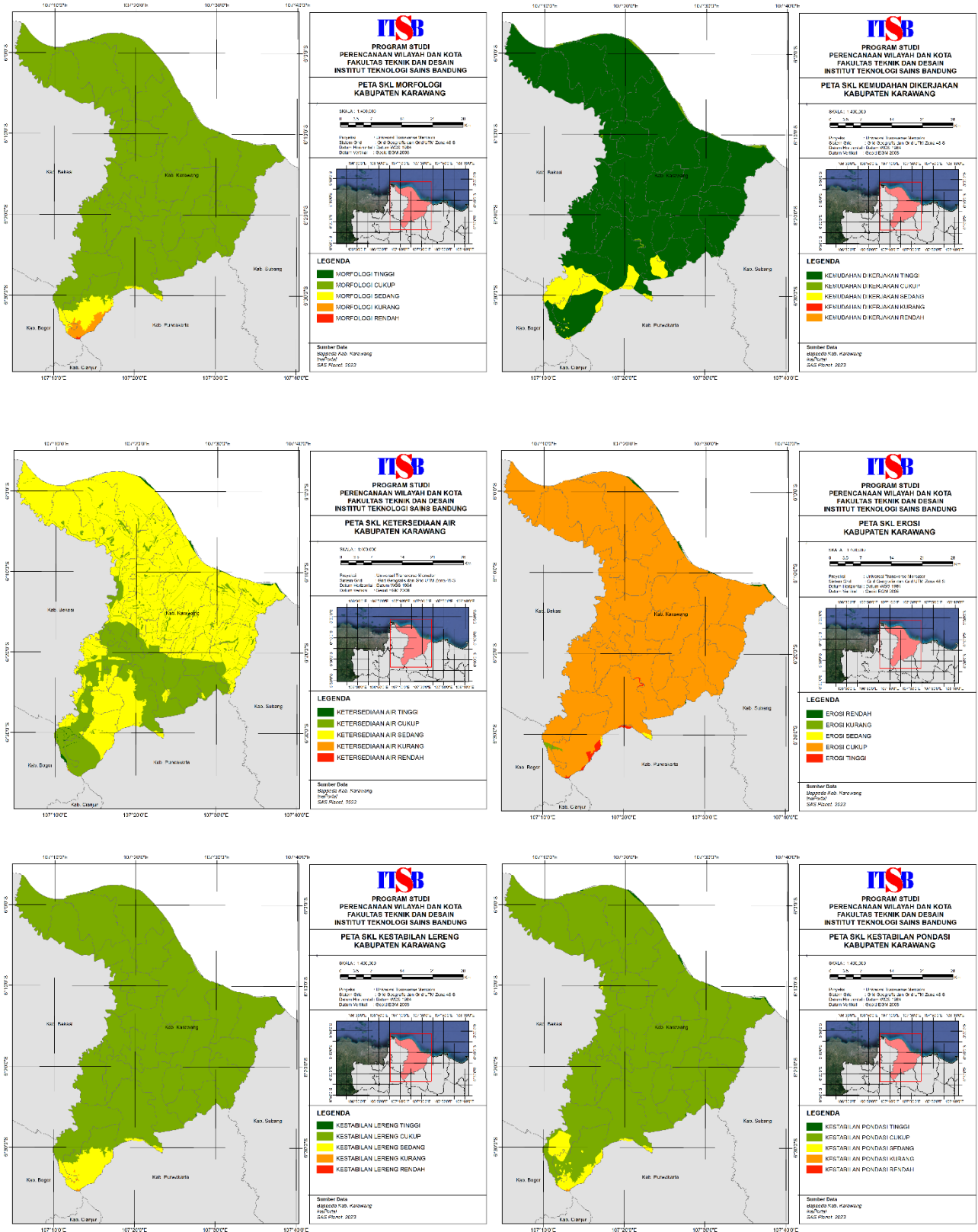
Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

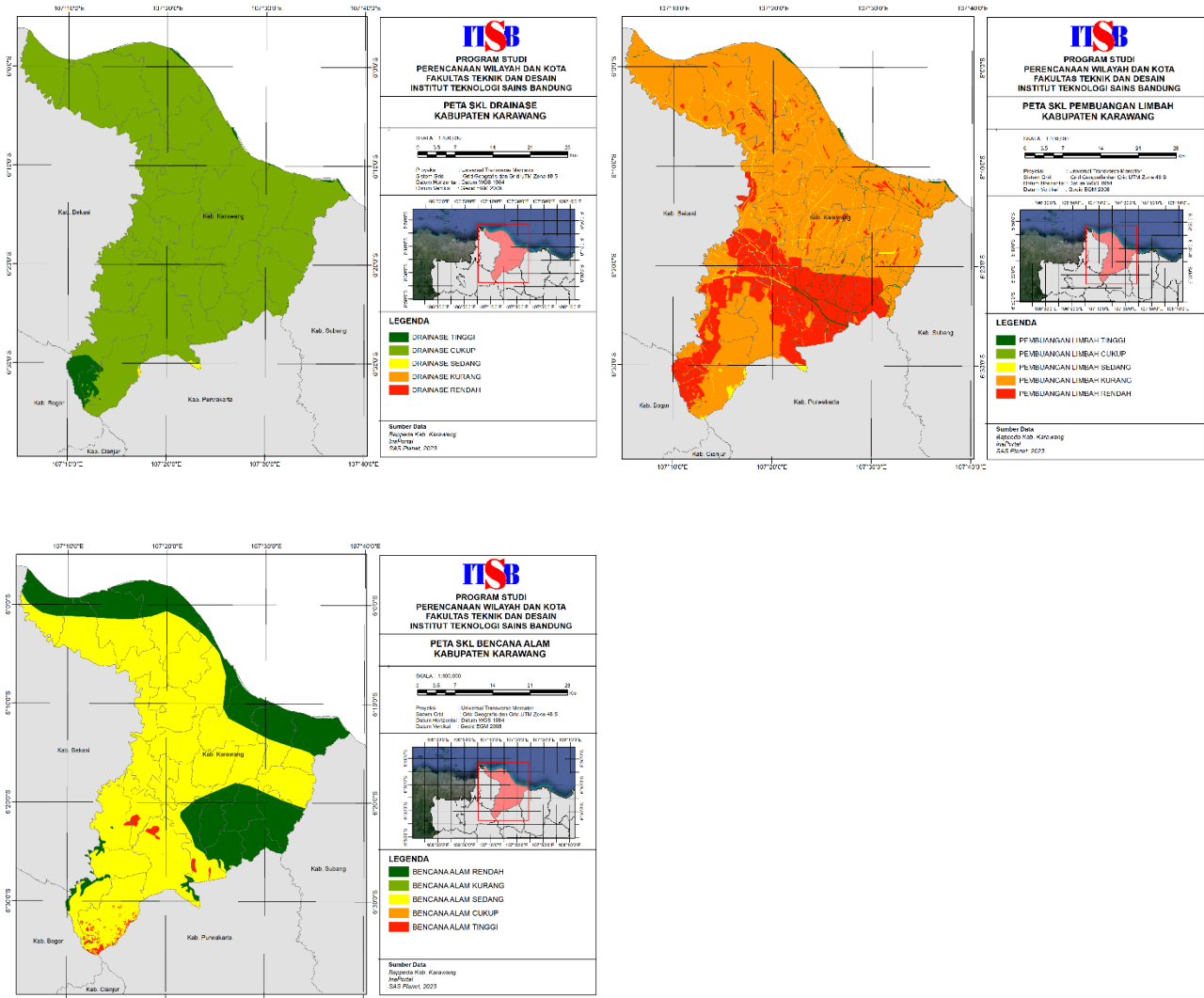
Tabel 19. Hasil SKL Bencana Alam

Hasil SKL Bencana Alam		
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase
Bencana Alam Rendah	58059.92834	30%
Bencana Alam Sedang	131220.167	69%
Bencana Alam Tinggi	1817.871753	1%
	191097.9671	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil analisis yang telah dilakukan diatas dapat dilihat pada Peta SKL sebagai berikut.





Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1. Peta Satuan Kemampuan Lahan Kabupaten Karawang

10) Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan cara mengoverlay seluruh hasil satuan kemampuan lahan / peta SKL yang telah dihasilkan sebelumnya dengan kemudian mengalikan nilai akhir dengan bobot dimasing-masing jenis SKL-nya. Berikut ini adalah acuan bobot yang digunakan untuk setiap SKL.

Tabel 20. Bobot Satuan Kemampuan Lahan

Bobot Untuk Analisis Satuan Kemampuan Lahan		
No	Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
1	SKL Morfologi	5
2	SKL Kemudahan Dikerjakan	1
3	SKL Kestabilan Lereng	5
4	SKL Kestabilan Pondasi	3
5	SKL Ketersediaan Air	5
6	SKL Terhadap Erosi	3
7	SKL Untuk Drainase	5
8	SKL Pembuangan Limbah	0
9	SKL Terhadap Bencana Alam	5

Sumber: Permen PU No 20 Tahun 2007

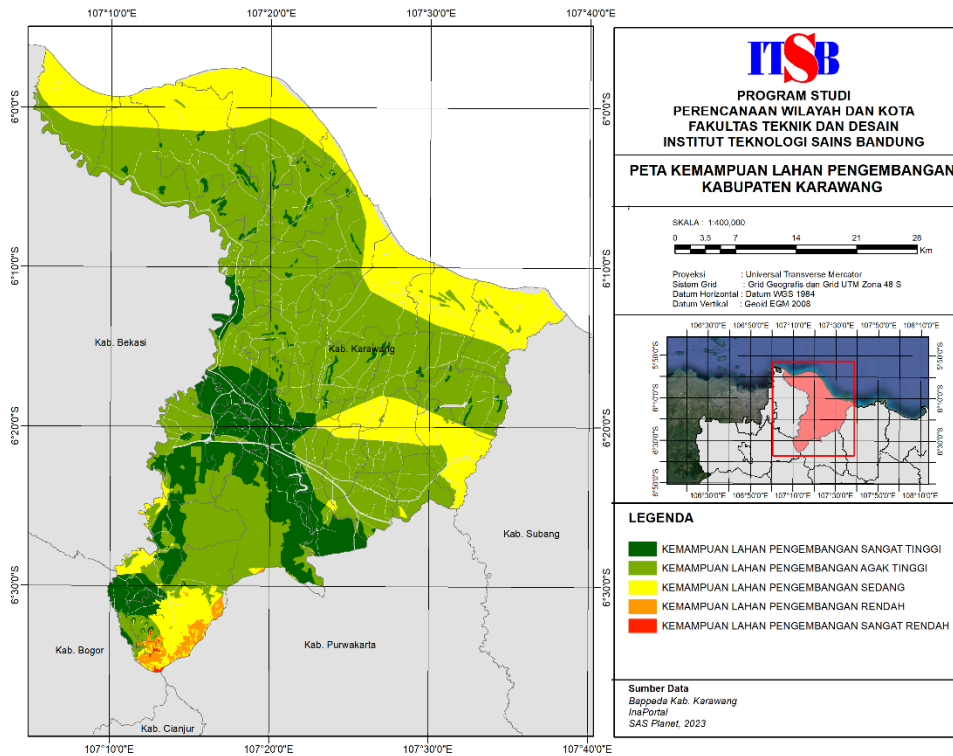
Setelah dilakukan pengalihan pembobotan, maka Langkah selanjutnya adalah mengatur kelas interval kemampuan lahan pengembangannya menggunakan panjang kelas dan lebar kelas, hingga didapatkan darinya lima kelas interval disertai dengan sebaran luasannya sebagaimana berikut,

Tabel 21. Hasil Klasifikasi Kemampuan Lahan

Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Karawang		
Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan
90 - 96	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
97 - 103	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Rendah
104 - 110	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang
111 - 117	Kelas D	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi
118 - 124	Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi

Hasil Kelas Kemampuan Lahan Pengembangan			
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase	Arahan Peruntukan Kawasan
Kelas A (Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah)	104.11	0%	Lindung (arahan tutupan lahan maksimal 0%)
Kelas B (Kemampuan Pengembangan Rendah)	1,596.57	1%	Lindung (arahan tutupan lahan maksimal 0%)
Kelas C (Kemampuan Pengembangan Sedang)	44,467.70	24%	Penyangga (arahan tutupan lahan maksimal 20%)
Kelas D (Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi)	109,173.41	60%	Pengembangan (arahan tutupan lahan maksimal 50%)
Kelas E (Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi)	28,141.10	15%	Pengembangan (arahan tutupan lahan maksimal 70%)
Total	183,482.90	100%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 2. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Karawang

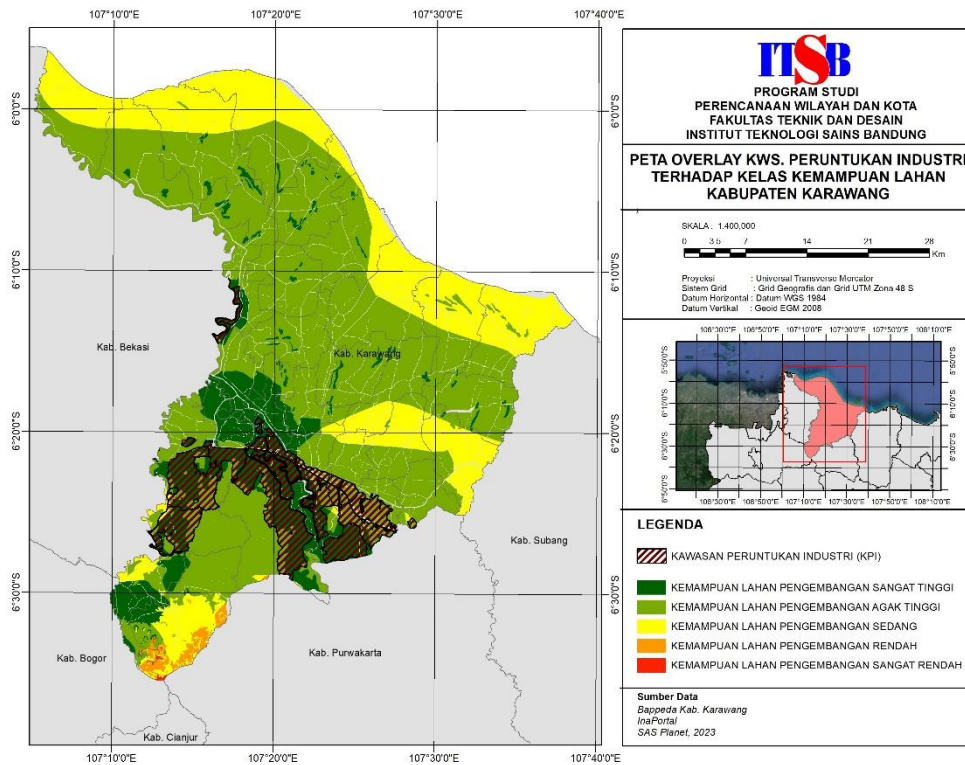
11) Overlay Peta Kawasan Peruntukan Industri dengan Kelas Kemampuan Lahan Pengembangannya

Setelah didapatkan kelas kemampuan lahan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang, selanjutnya akan dilakukan proses *overlay* yaitu menampal kelas kemampuan lahan sebelumnya dengan lokasi kawasan peruntukan industri hingga didapatkan darinya luasan untuk setiap kelas kemampuan lahannya sebagaimana berikut,

Tabel 22. Hasil Overlay KPI Terhadap Klasifikasi Kemampuan Lahan

Hasil Overlay Kesesuaian Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan Pengembangan			
Keterangan	Luasan (Ha)	Persentase	Arahan Peruntukan Kawasan
Kelas C (Kemampuan Pengembangan Sedang)	163.86	1%	Penyangga (arahan tutupan lahan maksimal 20%)
Kelas D (Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi)	6,468.48	35%	Pengembangan (arahan tutupan lahan maksimal 50%)
Kelas E (Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi)	11,589.27	64%	Pengembangan (arahan tutupan lahan maksimal 70%)
Total	18,221.61	100%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 3. Peta Overlay KPI dengan Kelas Kemampuan Lahan

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Karawang memiliki luasan klasifikasi kemampuan lahan pengembangan yang bervariasi, dimana kelas kemampuan lahan pengembangan d dan e menjadi yang dominan disana. Adapun, Ketika dilakukan teknik *overlay* antara peta peruntukan kawasan industri dengan peta kemampuan lahan pengembangannya didapat bahwa mayoritas berada pada tiga jenis kelas kemampuan lahan pengembangan, yaitu

kelas c, d, dan e dengan luasan yang berbeda-beda. Adapun, maksud dari setiap kelas kemampuan lahannya adalah sebagai berikut,

- a. Kelas kemampuan lahan A dan B merupakan kriteria untuk Kawasan lindung karena maksimal penutupan lahannya adalah 0%
- b. Kelas kemampuan lahan C merupakan kriteria untuk Kawasan penyangga karena maksimal penutupan lahannya adalah maksimal 20% namun memiliki syarat ketentuan dalam penggunaannya
- c. Kelas kemampuan lahan D dan E merupakan kriteria untuk Kawasan pengembangan karena lahan maksimal penutupan lahannya 50% dan 70% dari luas Kawasan, sehingga cocok untuk dikembangkan

4. Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya lokasi keberadaan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karawang mayoritas telah sesuai karena sebagian besarnya telah berada di kelas kemampuan lahan d dan e dan hanya sebagian kecilnya saja yang berada di kelas kemampuan lahan c. Adapun, hasil dari analisis satuan kemampuan lahan ini juga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Karawang dikedepannya, baik mengenai fungsi lindung ataupun budidaya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Karawang atas dorongan motivasi dan bimbingannya sehingga artikel ilmiah ini dapat selesai dengan sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, penulis juga sampaikan terima kasih banya kepada para pihak lainnya yang senantiasa mendukung penulis selama menjalani karir akademik ini.

Daftar Pustaka

- Rivaldo Restu Wirawan, Veronica A. Kumurur, & Fela Warouw. (2019). Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan di Kota Palu (Vol. 6). Jurnal Spasial.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. (1989). Pemerintah Pusat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031. (2011). Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018—2038. (2018). Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup noor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang. (2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (n.d.). Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian 2015.